

KEWIRAUSAHAAN PRIBUMI DAN MASALAH BUDAYA

Oleh Nurcholish Madjid

Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bab ini, ada baiknya kita samakan persepsi dulu dalam memaknai istilah “pribumi”. Persamaan persepsi ini perlu berkenaan dengan penggunaan istilah ini yang kadang-kadang mengandung stigma yang harus kita ketahui dan kita pahami terlebih dulu. Istilah “pribumi” itu stigmatis karena mengisyaratkan “rasialisme”, sebab konotasi langsungnya—yang biasa dipahami oleh masyarakat kita—ialah “bukan” Cina, jika tidak malah “anti” Cina. Dari permulaan kita harus benar-benar jelas bahwa ketika membicarakan masalah “pribumi” dan “non-pribumi”, kita harus bebas dari rasialisme. Sebab rasialisme tidak saja menyalahi konstitusi—karena sebagian besar orang “non-pribumi” adalah warga negara yang sah, dan banyak dari mereka yang memiliki semangat patriotik yang tinggi, seperti Haji Abdul Karim Oei—tetapi juga secara lebih mendalam rasialisme menyalahi dasar perikemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang lebih prinsip (mendasar) lagi, paham perbedaan warna kulit ini menyalahi ajaran agama yang *ḥanīf* (Islam).

Oleh karena itu, membicarakan masalah “pribumi” harus dengan jelas dalam kerangka dasar pemikiran prinsipil yang benar, terutama nilai keadilan sosial. Sebab, istilah “pribumi” sesungguhnya merupakan epitet (sebutan) untuk golongan yang kurang beruntung dalam susunan sosial-ekonomi di negeri kita. Dan dalam pengertian ini, “kaum tak beruntung” itu tidak

hanya menyangkut warga negara “asli” lawan “tidak asli”—dua istilah yang tidak kurang stigmatismenya daripada istilah “pribumi” sendiri—tetapi juga menyangkut sebagian mereka yang disebut “non-pribumi” atau “tidak asli”.

Tetapi, memang harus diakui hampir mustahil mengingkari kenyataan bahwa susunan sosial-ekonomi kita, jika digambarkan secara grafis berbentuk kerucut, yang berada di puncak kerucut itu ialah mereka yang disebut golongan “non-pribumi”, sedangkan pada tingkat yang lebih rendah, yaitu dari tingkat menengah ke bawah sampai ke tingkat dasar kerucut itu kebanyakan diisi oleh mereka dari golongan yang disebut “pribumi”. Kenyataan ini dari sudut rasa keadilan semakin kuat dirasakan sebagai “tidak semestinya” karena dilihat dari proporsinya kaum non-pribumi meliputi hanya suatu prosentase yang amat kecil dari jumlah warga negara secara keseluruhan, sementara penguasaan mereka atas sumber daya ekonomi bangsa meliputi suatu prosentase yang besarnya fantastis. Padahal, biar pun seandainya penguasaan atas sumber daya ekonomi nasional yang sangat besar itu dilakukan oleh golongan “pribumi”, rasa keadilan masyarakat pasti juga tetap terganggu dan mendorong yang bersangkutan untuk menggugat.

Sementara itu, kalau kita menganggap hal-hal tersebut sebagai persoalan yang sangat penting, tentunya yang lebih penting lagi adalah mencoba mencari diagnosa dan terapinya untuk mengatasi persoalan tersebut. Ini jelas bukanlah persoalan yang mudah sehingga membutuhkan pembahasan dan perhatian yang lebih mendalam. Walaupun begitu, tidak ada salahnya jika kita semua mencoba bersama, dengan cara saling *urun rembug* dan tukar pikiran dalam mencari cara pemecahannya.

Dalam hampir setiap pembicaraan seperti ini, boleh dipastikan akan ada orang yang menyebut “warisan kolonial” sebagai biang keladi. Meskipun tentu kezaliman kolonial bukanlah satu-satunya sebab, namun terang sekali bahwa penilaian seperti itu tidak dapat disalahkan. Kaum kolonial, demi kepentingan kolonialisme mereka, memang secara zalim membagi—berdasarkan status so-

sial dan ekonomi—penduduk Nusantara dalam tingkat-tingkat. Golongan kulit putih (kolonialis) sendiri berada di tingkat teratas, termasuk di sini mereka yang memperoleh hak-hak istimewa, yaitu golongan mana pun yang “ikut serta” atau “berpartisipasi” membantu kegiatan kolonialisme mereka dan mau ikut dalam berbudaya “modern” atau Barat. Kemudian disusul oleh yang disebut golongan “timur asing” (kebanyakan golongan keturunan Cina, tetapi juga mencakup golongan-golongan India dan Arab tertentu), lalu golongan aristokrat pribumi, dan pada tingkat paling bawah adalah golongan “rakyat jelata”. Politik pembagian masyarakat berdasarkan status sosial dan ekonomi ini tercermin dalam sistem pendidikan kolonial, seperti tingkat sekolah dasarnya yang mengenal bentuk-bentuknya tersendiri yang diskriminatif, yang tertinggi adalah untuk golongan putih, yaitu ELS, kemudian untuk timur asing sekolah HCS dan HAS, disusul untuk kaum priyayi sekolah HIS, dan yang terakhir atau terendah, untuk “rakyat”, yaitu “Sekolah Rakyat”.

Adanya perbedaan dalam tingkat dan kualitas pendidikan itu—misalnya, kualitas rendah yang dimiliki “sekolah rakyat” membuat lulusannya tidak dapat melanjutkan ke mana-mana—mengakibatkan kesenjangan besar sekali dalam perolehan (lebih tepat lagi, “pemberian”) kesempatan. Karena kenyataannya kita hidup di zaman modern—yang secara lahiriahnya adalah zaman yang didominasi oleh budaya Barat, yaitu juga budaya milik kaum kolonial—maka perbedaan kesempatan kepada pendidikan modern juga berarti perbedaan dalam akses kepada sektor kehidupan modern, dengan dampak kesenjangan yang besar sekali yang masih terasa sampai saat ini. Masyarakat-masyarakat di luar “Dunia Pertama” (*First World*, Barat), khususnya masyarakat-masyarakat “Dunia Ketiga”, selalu mengenal pembagian dua sektor dalam sistem sosial-ekonominya, yaitu sektor tradisional dan sektor modern. Hal ini tidak bisa kita lepaskan dari masalah “warisan kolonial” sebagaimana telah kita bahas di atas. Dari kenyataan ini maka sektor modern selalu berada pada mereka yang memiliki

kesiapan kultural modern, terutama pada mereka yang pernah mengecap pendidikan formal modern.

Dan karena usaha pendidikan selalu merupakan penanaman modal kemanusiaan (*human investment*) dengan *time of response* yang panjang dan dampak yang panjang pula (dalam ukuran generasional), maka akibat pendidikan kolonial itu pun tetap dirasakan sampai sekarang. Sementara itu, “rakyat” yang mengejanya juga membutuhkan waktu yang sangat panjang, dan tentunya untuk benar-benar menyusulnya membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang lagi. Ini adalah salah satu keterangan mengapa sampai sekarang, setelah bebas dari kolonialisme selama lebih dari 50 tahun, kesenjangan dan ketidakadilan masih terus berlangsung, dan sebagian besar yang berada di bagian atas kerucut sosial-ekonomi masih tetap berada di sana dengan segala hak-hak istimewanya. Sedangkan mereka yang berada di bagian bawah harus dengan susah payah dan dalam tempo yang sangat lambat untuk mampu naik ke jenjang yang lebih tinggi.

Tetapi, kita tidak bisa mengklaim bahwa adanya kesenjangan ini semuanya disebabkan oleh warisan kolonial. Faktor-faktor sosial-politik setelah kemerdekaan pun, secara cukup ironis, mempunyai dampak pelebaran kesenjangan-kesenjangan yang ada. Teori-teori konspirasi dan praktik “pecah dan kuasai” memang sangat menarik—dan barangkali tidak dapat diabaikan begitu saja—tetapi jelas hal itu lebih berharga hanya sebagai bumbu retorika politik yang pesimis. Mungkin lebih berfaedah jika kita melihat kenyataan bahwa masa-masa paling menentukan dalam pertumbuhan dan perkembangan bangsa kita sebagai bangsa merdeka telah secara cukup menentukan ikut membuat kesenjangan kesempatan tadi menjadi lebih sulit diatasi daripada seharusnya. Misalnya, karena pertentangan ideologis yang menyangkut masalah dasar negara dipandang banyak orang sedemikian gawatnya, maka pihak yang kalah, yang ideologinya dianggap “berbahaya”, akan dengan sendirinya disingkirkan dari percaturan politik kenegaraan dan dengan begitu tertutup bagi mereka untuk mendapat banyak kesempatan.

Persoalan di atas itu tampak nyata pada awal-awal Orde Baru, yaitu pada saat hendak dilancarkan pembangunan nasional. Di atas kertas, dalam perhitungan berdasarkan nasionalisme dan patriotisme, komunitas wirausahawan pribumi seharusnya mendapatkan, atau diberi kesempatan pertama dan utama. Tetapi, karena kebanyakan anggota komunitas itu berada dalam lingkaran ideologis-politis yang saat itu dipandang “membahayakan”—ditambah beberapa perilaku tertentu yang kurang menguntungkan dari pihak pemegang otoritas ideologis-politis komunitas itu sendiri—maka dalam kerangka berpikir “jangan ambil resiko” kesempatan ambil bagian dalam pembangunan itu diperoleh atau diberikan kepada mereka yang secara ideologis-politis dipandang aman. Kiranya cukup banyak orang mampu melihat dan sepakat bahwa kesenjangan sosial-ekonomi yang sekarang terjadi ini adalah akibat “politik” pembangunan yang mau-tidak-mau, untuk amannya pembangunan itu sendiri, sangat memperhitungkan resiko dan untung-rugi ideologis-politis itu. Akibatnya ialah bahwa golongan tertentu yang lebih aman secara ideologis-politis diuntungkan amat jauh di atas proporsinya.

Dengan keterangan-keterangan yang telah dibahas di atas itu ternyata kita belum sampai kepada seluruh alasan mengapa timbul kesenjangan dalam memperoleh kesempatan. Untuk adilnya, dan agar kita tidak terjebak ke dalam jalan buntu atau terdorong masuk jalan sesat, di sini kita harus menyebut adanya faktor “obyektif” yang sulit diingkari. Golongan non-pribumi, dalam hal ini keturunan Cina, disebabkan oleh *mind set* mereka sebagai golongan minoritas yang sehari-hari menghadapi persoalan hidup atau mati di negeri orang (yang seringkali memperlakukan mereka dengan sikap-sikap cukup merugikan), membuat mereka lebih ulet dan berkembang dengan kualitas-kualitas kewirausahaan (*entrepreneurial*) yang tangguh, kerja keras, ingkar kepada diri sendiri (*self denial*), hemat, hidup sederhana (bebas dari *demonstration effect*), produktif, industrial, mampu melihat jauh ke depan, biasa menabung, tepat janji, tepat waktu, dapat dipercaya, dan seterusnya.

Di atas itu kita tidak bicara tentang segi kejujuran—suatu bagian amat penting dalam kewirausahaan—disebabkan sifatnya yang agak ilusif, juga tidak kita bicarakan keberanian menempuh resiko—juga sebuah nilai kewirausahaan yang amat penting—sebab, dalam kerangka ukuran etis yang berbeda, antara lain menyebabkan tidak adanya keseganan menyuap, misalnya. Namun, pada golongan non-pribumi nilai-nilai kewirausahaan tersebut jelas ada dan sangat kuat. Biasanya inilah keterangannya mengapa keturunan Cina umumnya memperoleh sukses besar tidak saja di Indonesia dan di negara-negara bekas jajahan, di mana teori “warisan kolonial” tadi berlaku. Bahkan di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia banyak dari mereka yang memperoleh kesuksesan. Dalam era globalisasi dan dunia yang semakin terbuka sekarang ini boleh dikatakan tidak ada kawasan bumi tanpa kewirausahaan keturunan Cina.

Berkaitan dengan itu, akhir-akhir ini semakin sering dan nyaring terdengar analisa tentang peranan etika Kong Hucu (Konfusianisme) sebagai landasan yang memacu bagi kemajuan bangsa-bangsa Asia Timur (sisi barat dari Lembah Lautan Teduh, *Pacific Rims*) yang tampil semakin kuat dan mengesankan sebagai “negara-negara industri baru” (*Newly Industrializing Countries—NIC’s*). Sisi ini diperkuat oleh kebiasaan orang Barat, melalui pers mereka, untuk menyebut negara-negara industri baru itu (Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura) sebagai “Naga-naga Kecil” atau “*Little Dragons*”—naga adalah binatang mitologi Cina atau Konfusianisme—dengan nada pengakuan dan penghargaan kepada sistem etika itu.

Jika hal ini kita masukkan dalam diagnosa, maka terapinya kira-kira berada sekitar bagaimana diusahakan agar nilai-nilai *entrepreneurial* itu tumbuh pada golongan rakyat banyak, yang berarti golongan “pribumi”. Tetapi seperti ini dianggap banyak ahli memiliki segi kewajaran dan kemungkinan, mengingat bahwa memang di kalangan pribumi tertentu terdapat komunitas dengan semangat *entrepreneurial* yang cukup tinggi. Dalam kajian Clifford Geertz, seorang antropolog terkenal dari Amerika, menyebutkan bahwa kalangan santri di Jawa,

dan kalangan ksatria di Bali, memiliki jiwa kewirausahaan yang potensial. (Lihat buku Geertz, *Peddlers and Princes*). Khususnya tentang kaum santri di Jawa, semangat kewirausahaan mereka terkait dengan watak agama Islam sebagai agama kaum pedagang yang kemudian menghasilkan pola budaya pantai dengan ciri-ciri keterbukaan, mobilitas tinggi, kosmopolitanisme, egalitarianisme, dan penghargaan terhadap kerja keras.

Tetapi, kenyataan kesantrian ini pula yang menjadi penghalang kultural-politis dalam hubungannya dengan struktur kekuasaan Indonesia merdeka. Karena Indonesia merdeka, dari sudut struktur politiknya, sebagian besar masih merupakan kelanjutan warisan kolonial, misalnya birokrasi zaman merdeka sebagian besar masih kelanjutan dunia kepriyayian zaman kolonial, maka kaum santri—yang dalam banyak hal merupakan imbalan atau saingan kaum priyayi namun dengan akses pada sektor modern yang jauh lebih lemah sebagai akibat kesenjangan pendidikan tersebut di atas—kemudian tersisih atau sengaja disisihkan. Pilihan pun lebih banyak jatuh kepada komunitas sosial ekonomi dengan resiko ideologis-politis dan kultural yang lebih aman.

Jika analisa ini benar, maka penyelesaian masalah ketidakadilan yang mencolok sekarang ini menyangkut masalah politik atau ke-mauan politik. Misalnya, politik pembangunan berdasarkan paham ekonomi pasar agaknya harus dikombinasi dengan patriotisme dan nasionalisme yang lebih kuat dan terarah, dengan menerapkan politik “diskriminasi positif”—istilah mending Jendral T.B. Simatupang—yaitu politik pemihakan secara sadar dan terarah kepada kaum lemah ekonomi dengan membantu, menumbuhkan, dan memberi mereka kesempatan yang sengaja diperbesar. Di Amerika Serikat politik ini—yang menyangkut masyarakat kulit hitam—dikenal dalam *euphemisme*-nya, sebagai kebijakan “kesempatan sama” (*equal opportunity*), yang wujudnya pemberian kesempatan lebih besar kepada warga Amerika yang kurang beruntung. [❖]